

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur wilayah miliknya. Salah satu tanggung jawab dari pemerintah daerah adalah membuat dan melaporkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pemerintah kota harus sistematis, transparan, dan bertanggung jawab dalam menyusun laporan perekonomian daerah agar dapat melaksanakan pengelolaan yang baik dan optimal. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah

“penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugasnya pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan urusan pemerintahan ialah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah sesuai asas otonomi.

2.2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah dilaksanakan dengan maksud agar daerah dapat menangani urusan pemerintahan didasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang ada, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Nurcholis (2007)

“otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.”

Dengan demikian pengertian lebih luas mengenai otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Agar tujuan pemberian otonomi yang bertanggung jawab kepada kota atau daerah dapat dicapai secara maksimal dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisiensi, penataan-penataan dalam berbagai aspek pemerintahan perlu segera dilakukan, antara lain: penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan pengawasan.

Adapun dalam kepentingan wilayah, salah satunya adalah pemerintah daerah setempat yang memiliki otorisasi untuk membuat laporan keuangannya sendiri. Laporan keuangan tersebut diharapkan menghasilkan laporan yang baik, berkualitas dan tentunya laporan keuangan tersebut dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan, serta dapat dipertanggung jawabkan secara nyata.

2.3 **Badan Pemeriksa Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD)**

Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.18 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dan Anggaran Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah. BPKAD sendiri dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya didukung dari beberapa bidang seperti bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah, dan kelompok jabatan fungsional lainnya. Adapun fungsi dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, secara rinci adalah :

- Perumusan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah.
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran.
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan.
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi.
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah.
- Pelaksanaan administrasi BPKAD sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

BPKAD pada dasarnya melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, meningkatkan pengawasan dan pengendalian keuangan daerah, serta mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel. Beberapa hal pula yang menjadi sasaran dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah terwujudnya ketepatan waktu penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas, dan terwujudnya tata kelola barang milik daerah yang berkualitas.

Salah satu tugas pokok dari BPKAD sendiri adalah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang maksud dan tujuan penyusunannya adalah sebagai bukti pertanggung jawaban dan pengelolaan serta pemenuhan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, serta dapat menghasilkan informasi bagi pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional pemerintah dalam penggunaan anggaran dan juga penilaian dalam hal akuntabilitas untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Selain membuat laporan keuangan, BPKAD juga memiliki kewajiban untuk melakukan konsolidasian. Tujuan dari penyajian laporan keuangan secara terkonsolidasi adalah agar laporan keuangan dapat mencerminkan satu kesatuan entitas yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum daerah dan juga memenuhi kebutuhan pengguna laporan termasuk lembaga legislatif dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Kualitas Laporan Keuangan

2.3.1. Definisi

Laporan keuangan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaporkan pengelolaan keuangannya dalam daerah tersebut dalam satu tahun atau periode. Menurut Said dan Noch (2018), Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah

“suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.”

Laporan keuangan digunakan untuk menentukan nilai sumber daya keuangan yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi entitas pelapor, dan menentukan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (Djalil, 2014).

Pemenuhan target atas laporan keuangan ini sendiri dapat dicapai dengan memperbaiki berbagai aspek yang beberapa di antaranya termasuk dalam ketiga variabel yang sedang diteliti.

2.3.2. Pengukuran

Terdapat beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

1. Relevan

Data dan informasi keuangan yang sesuai / relevan dapat berhubungan dengan *goals* dari penggunaannya, yaitu :

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Mengizinkan *user* mengonfirmasi atau memperbaiki harapan mereka dimasa yang sebelumnya.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Bisa memberikan bantuan bagi *user* untuk memperkirakan masa depan dengan melihat perkembangan terakhir dimasa lalu dan peristiwa yang terjadi sekarang

c. Tepat waktu

Data dan informasi diberikan pada waktunya agar berpengaruh dan berguna untuk pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi dalam laporan keuangan negara disajikan selengkap mungkin. Informasi yang Anda gunakan dapat memengaruhi setiap keputusan yang Anda buat.

2. Andal

Laporan keuangan harus disajikan tanpa misrepresentasi atau kesalahan material, menyajikan semua fakta secara wajar dan dapat diverifikasi. Informasi yang dapat dipercaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Penyajian Jujur

Pertanggung jawaban akuntansi tahunan menyajikan secara akurat data, transaksi bisnis dan kejadian lain yang diharapkan untuk disajikan secara wajar dan benar.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Dimungkinkan untuk menguji data yang disampaikan dalam laporan keuangan, kemudian jika pihak yang berbeda melakukan pengujian lebih dari satu kali, hasilnya tetap menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda satu sama lain.

c. Netralitas

Informasi yang dihasilkan tidak bertujuan untuk pihak tertentu saja, namun untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan tidak berat sebelah.

3. Dapat dibandingkan

Kualitas hasil laporan keuangan daerah mengandung informasi dan juga data yang bisa untuk diperbandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau pada umumnya dengan laporan keuangan entitas lain.

4. Dapat dipahami

Kualitas laporan keuangan daerah tentunya mengandung informasi yang dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan tersebut, sehingga berguna untuk mengoreksi keputusan pengguna periode sebelumnya dan untuk mengambil keputusan saat ini.

Penelitian ini mengadopsi indikator untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan yang diadopsi dari penelitian Aprila & Ikyarti (2019) yang selanjutnya dikembangkan oleh peneliti.

2.4. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan

2.4.1. Definisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kemudian, pada aspek pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan berpedoman pada perwujudan praktik terbaik di tingkat internasional, dengan menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di Indonesia, baik melalui peraturan perundangan dan beberapa praktik akuntansi yang berlaku, maupun kondisi sumber daya manusia. Selain itu, strategi peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan dilakukan dengan proses transisi menuju basis akrual. Saat ini, pencatatan berbasis akrual dilakukan pada kegiatan pencatatan aset, utang, dan ekuitas dana, sementara pencatatan berbasis kas dilakukan pada kegiatan pencatatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Di Indonesia, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun dan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagai PP Nomor 71 Tahun 2010.

Standar akuntansi negara diperkenalkan di wilayah administrasi, baik di kantor negara dan kementerianannya, maupun di kota madya daerah dan lembaganya. Pengenalan standar akuntansi negara diharapkan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan oleh otoritas negara bagian dan daerah.

2.4.2. Pengukuran

Menurut PP No. 71 tahun 2010, menjelaskan Standar Akuntansi pemerintah berbasis akrual memiliki beberapa indikator sebagai berikut :

1. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan ini disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai situasi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan perusahaan selama periode tersebut. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha, menilai keadaan keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi perusahaan, serta menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan.

2. Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi penerimaan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan realisasi pendanaan untuk unit pelaporan, setiap unitnya dibandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi untuk membantu memperkirakan bantuan ekonomi yang membiayai tindakan pemerintah di masa depan.

3. Laporan Arus Kas

Laporan ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang memperlihatkan data tentang pendapatan & pembayaran kas selama periode yang ditetapkan, dikategorikan dengan melihat aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, serta transisi.

4. Catatan atas laporan keuangan

Catatan ini bertujuan untuk dimengerti oleh banyak pembaca dan tidak terbatas pada pembaca atau manajemen tertentu dari entitas pelapor. Catatan atas laporan keuangan tahunan harus diberikan dalam bentuk yang sistematis. Catatan atas laporan keuangan mencakup penjelasan atau daftar rinci atau analisis nilai pos-pos yang ditampilkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Mutasi Surplus Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan.

5. Akuntansi Persediaan

Persediaan diakui ketika kemungkinan *benefit* ekonomi masa depan mengalir ke pemerintah dan nilai atau biayanya dapat diukur secara andal. Persediaan diakui pada saat penerimaan atau pada saat pengalihan kendali.

6. Akuntansi Investasi

Pengeluaran uang tunai atau properti bernilai akuisisi atau investasi jika memenuhi salah satu kriteria, yaitu potensi pengembalian ekonomi di masa depan dan potensi manfaat atau layanan sosial yang akan diperoleh pemerintah dari investasi tersebut.

7. Akuntansi Aset Tetap

Indikator ini dikategorikan berdasarkan sifat operasi perusahaan yang sama. Aset tetap diklasifikasikan ke dalam tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, serta infrastruktur pembangunan lainnya.

8. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Bangunan yang sedang dibangun meliputi tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan, irigasi, jaringan, dan aset lainnya yang membutuhkan waktu untuk memperoleh/membangun dan sedang dalam pengerjaan.

9. Akuntansi Kewajiban

Setelah kewajiban diakui, kemungkinan akan terjadi arus keluar sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban yang ada, dan setiap modifikasi kewajiban memiliki nilai pemenuhan yang dapat ditentukan secara andal.

10. Koreksi kesalahan

Indikator ini mengoreksi item yang disajikan sehingga menjadi apa yang seharusnya.

11. Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasi tersusun atas laporan pelaksanaan anggaran, laporan perubahan sistem akuntansi (SAP), neraca, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

12. Laporan Operasional.

Hal ini memberikan gambaran tentang sumber-sumber ekonomi penambah modal dan pemanfaatannya yang dikuasai oleh pemerintah untuk kegiatan administrasi selama periode pelaporan.

Penelitian ini mengadopsi indikator untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan yang diadopsi dari penelitian Siahaan & Simanjuntak (2020) yang selanjutnya dikaji ulang oleh peneliti.

2.5. Sistem Pengendalian Internal

2.5.1. Definisi

Definisi Sistem Pengendalian Internal, menurut Mulyadi (2013)

“adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Dari beberapa definisi di atas, pengendalian intern adalah suatu proses pengendalian yang melekat pada pimpinan suatu organisasi dan tindakan serta aktivitas seluruh pegawai, bersifat insidental dan tanggap terhadap situasi khusus, serta dilakukan dengan berkesinambungan. . Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar, tetapi tidak memberikan jaminan mutlak sebab sangat susah untuk membuat sistematika yang sempurna. Selain itu, sistem pengendalian intern memiliki keterbatasan, sehingga terdapat kemungkinan gangguan dan pelanggaran terhadap sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern belum final dan harus senantiasa diperiksa, ditinjau kembali, dilakukan tes, dikembangkan serta diperbaiki lebih lanjut. (Mahmudi, 2011)

2.5.2 Pengukuran

Pengendalian memiliki komponen-komponen menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Berkontribusi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal di ranah kerja lewat pemeliharaan integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, demonstrasi kepemimpinan, pembentukan bagan organisasi yang sesuai dan tepat sasaran, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, serta formulasi dan implementasi yang baik. perilaku positif dan bermanfaat. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang konkret, peran pengawasan internal pemerintah yang efektif dan kerja sama yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko harus menilai risiko yang dihadapi oleh suatu unit instansi baik secara eksternal ataupun internal. Mewajibkan pemimpin dari suatu instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko, yang terdiri dari penentuan dan analisis risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian meliputi penelaahan operasi instansi pemerintah terkait, pengembangan sumber daya manusia, pengendalian pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik aset, dan mengidentifikasi dan meninjau indikator skalabilitas

pekerjaan, pembagian tugas, otorisasi transaksi dan peristiwa penting, akurat dan pencatatan transaksi dan peristiwa secara tepat waktu, akses terbatas ke sumber daya dan catatan, pertanggungjawaban tanggung jawab atas sumber daya dan catatan, dan dokumentasi yang tepat atas pengendalian internal dan peristiwa penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Meminta setiap pimpinan instansi pemerintah untuk mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan informasi dalam bentuk yang benar dan pada waktu yang tepat.

5. Pemantauan

Sebagai bagian dari proses pemantauan, perlu dilakukan evaluasi kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari hasil audit dan evaluasi lainnya dapat segera dilaksanakan.

Penelitian ini mengadopsi indikator untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan yang diambil dari Aprila & Ikyarti (2019) yang selanjutnya dikaji kembali oleh peneliti.

2.6. Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.6.1. Definisi

Menurut Wirawan (2009) Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif. Selain itu, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 46A Tahun 2003 menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah

“kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien”.

Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya, maka variabel ini berhubungan dengan sifat dasar dari suatu individu yang bisa diprediksi dalam berbagai jenis situasi dan bertindak sebagai motivasi untuk melakukan dan keinginan untuk mencoba melakukan tugas secara efektif. Selanjutnya, dari definisi di atas kita juga dapat menyimpulkan bahwa kompetensi manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam kaitannya dengan pengetahuan, keterampilan, dan sifat-sifat kepribadian yang secara langsung mempengaruhi kinerja pekerjaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.6.2 Pengukuran

Menurut Hutapea dan Thoha (2008) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi, adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki oleh karyawan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, tergantung pada industri yang diikutinya. Informasi yang dimiliki

oleh karyawan atau informasi yang dapat digunakan dalam situasi kerja nyata. Pengetahuan karyawan juga menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam melakukan tugas yang diberikan. Personil dengan kompetensi yang memadai meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Keterampilan (*skill*) adalah segala hal yang dilakukan oleh individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada pegawai perusahaan secara benar dan optimal. Misalnya, keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja dalam kelompok dan mengerti serta memberikan dorongan bagi orang yang ada di sekitar, baik secara individu maupun kelompok. Keterampilan ini sangat penting bagi karyawan di posisi tertentu karena melibatkan komunikasi, motivasi, dan pendelegasian. Selain pengetahuan dan keterampilan karyawan, sikap dan perilaku karyawan juga harus diperhatikan.
3. Sikap (*attitude*) adalah model perilaku seorang karyawan ketika dia memenuhi segala hal yang dipercayakan kepada individu tersebut sebagaimana ditentukan oleh instansi. Jika pegawai membantu dalam pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis semua tugas yang dibebankan kepada individu tersebut akan diselesaikan dengan sebaik mungkin.

Penelitian ini mengadopsi indikator untuk mengukur variabel Kualitas Laporan Keuangan yang diadopsi dari penelitian Permatasari & Rahman (2021) yang selanjutnya dilanjutkan oleh peneliti.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Berdasarkan pengertian dari Anthony & Govindarajan (2011),

“teori agensi adalah sebuah hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principal*) memberi wewenang kepada pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa, dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada pihak *agent*.”

Selain itu, menurut Jensen & Meckling (1976), teori agensi menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu pihak atau lebih (*principal*) mempekerjakan pihak yang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa *principal* memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada *agent* yang di mana nantinya pihak *agent* akan mengelola atau melaksanakan tanggung jawab tersebut. Pada akhirnya, pihak *agent* harus memberikan pertanggungjawaban kepada pihak *principal*.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan teori agensi karena dalam hal ini, BPKAD Kaltim yang berperan sebagai *agent* harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada gubernur provinsi yang berperan sebagai *principal*. Sumber daya ekonomi yang diterima dan digunakan oleh beberapa OPD termasuk BPKAD digunakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan daerah yang ideal, harus dilaporkan secara benar dan berpedoman pada SAP yang telah ditulis di dalam Peraturan Pemerintah. Secara khusus, tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menghasilkan data yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan untuk menilai kinerja keuangan dan tanggung jawab dari OPD atas sumber daya yang dikelola dan Keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Gubernur di sini berhak mengawasi dan meminta sebuah transparansi dan kejelasan mengenai penggunaan sumber daya ekonomi dan aliran dana yang telah digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait karena secara kelembagaan, gubernur yang memberikan tugas kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mampu menghasilkan laporan yang berkualitas. Tujuan pengawasan ini sendiri adalah untuk meminimalisir tingkat kesalahan maupun kecurangan yang terdapat di dalam laporan keuangan daerah. Selain itu, keberhasilan dari sebuah laporan keuangan diukur melalui kualitasnya yang dapat kita lihat dari kesesuaian dari isi laporan keuangan dengan kejadian yang sebenarnya dan tingkat efektivitas dari *output* laporan keuangan daerah yang kemudian dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait.

2.7.2. Hubungan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban APBD harus disusun dari sebuah sistem akuntansi keuangan daerah yang berkompeten, yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak aplikasi komputer.

Standar ini adalah persyaratan yang dapat ditegakkan secara hukum yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dana oleh pemerintah Indonesia. Standar ini biasa untuk digunakan karena bisa menyempurnakan alur yang digunakan selama ini sehingga informasi tentang

keuangan yang mendokumentasikan pengguna laporan menjadi lebih akurat dan tepat, sehingga terhindar dari kesalahan. Pengetahuan yang baik tentang standar akuntansi negara memberikan kualitas yang andal dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan kata lain, pelaporan keuangan yang sehat berasal dari pemahaman yang baik tentang akuntansi pemerintah dan penyajian lengkap semua informasi.

2.7.3. Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Definisi Sistem Pengendalian Internal, menurut Mulyadi (2013)

“adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal, dapat membantu dalam membuat sebuah laporan yang berkualitas dengan menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak sengaja. Sistem pengendalian internal itu sendiri merupakan pedoman pelaksanaan dan ukuran untuk memeriksa efektivitas lembaga negara dalam mencapai tujuan operasional. Untuk memastikan bahwa kontrol berfungsi dengan benar dan sepenuhnya, pemantauan berkelanjutan harus dilakukan. Pengendalian intern adalah hal-hal yang wajib dilakukan oleh lembaga untuk memenuhi targetnya. Pengelolaan internal bekerja dalam mencegah penyalahgunaan dalam organisasi. Penerapan proses pengendalian internal yang tepat memastikan kualitas penuh laporan keuangan.

2.7.4. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Wirawan (2009) Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif. Sumber daya manusia itu sendiri merupakan modal manusia organisasi. Modal manusia adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menciptakan layanan profesional.

Jika personel yang diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi tidak memiliki kualifikasi dan kualifikasi yang diperlukan, hal ini menimbulkan hambatan bagi kinerja fungsi akuntansi, dan akhirnya data akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, sistem akuntansi berkualitas buruk. . Informasi yang diterima menjadi informasi yang hilang atau tidak berharga. Oleh karena itu, kapabilitas SDM mendukung ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dalam pengelolaan dan penyajian informasi keuangan, kompetensi staf menjadi sangat penting agar laporan keuangan dapat disusun tepat waktu.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian Anggadini, Aulia, dan Bramasto (2021) dengan judul Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Dampak dari Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel bebasnya adalah sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan terhadap 30 pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Daerah Bandung Barat. Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Alwiyah, Hanum, Nilamsari, Sukesti, dan Wibowo (2020) dengan judul Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi OPD Kota Semarang. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel bebasnya adalah sistem pengendalian intern, kapasitas manusia, penggunaan teknologi informasi dan sistem akuntansi keuangan daerah utama. Penelitian ini dilakukan pada pegawai Organisasi Mesin Daerah (OPD) Kota Semarang yang menjalankan fungsi akuntansi atau keuangan minimal selama satu tahun. Kemudian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintahan daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh. dampak positif dan tidak penting. mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Permatasari dan Rahman (2021) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas pelaporan keuangan daerah, sedangkan variabel bebasnya adalah kapasitas sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah. Kajian ini dilakukan pada pegawai bagian pengelolaan keuangan atau akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan jumlah 369 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

Penelitian keempat dilakukan oleh Siahaan dan Simanjuntak (2020) dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan variabel independennya adalah Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal. Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara berjumlah 52 orang. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Penggunaan sistem informasi keuangan daerah, Pengetahuan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Intern semuanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Aprila dan Ikyarti (2019) yang memiliki judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel bebasnya adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem informasi manajemen daerah, dan penerapan sistem informasi manajemen daerah. pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada pegawai bagian pengelola keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Seluma yang terdiri dari 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi

pemerintahan, penerapan sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang keenam yang diteliti oleh Philadhelphia, Suryaningsum, dan Sriyono (2020) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan variabel independennya adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal. Penelitian ini dilakukan pada 20 OPD Kabupaten Klaten dengan jumlah responden sebanyak 95 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* memiliki nilai positif dan berpengaruh signifikan, sedangkan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia bernilai positif namun tidak berpengaruh signifikan, serta variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai negatif dan tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian yang ketujuh dilakukan oleh Shohabatussa'adah dan Nasrullah (2021) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan, sedangkan variabel independennya adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal. Penelitian ini dilakukan pada 31 OPD Kota Pekalongan dengan total 51 responden.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi bernilai positif namun tidak signifikan, sedangkan untuk variabel Sistem Pengendalian Internal bernilai positif dan signifikan. Berikut merupakan tabel 2.1. yang berisi ringkasan dan penelitian-penelitian terdahulu.

TABEL 2.1.

RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1	Anggadini, Aulia, dan Bramasto (2021)	Dependen (Y) : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.	1. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
		Independen (X) : X1 = Sistem Pengendalian Intern X2 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah		2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2	Alwiyah, Hanum, Nilamsari , Sukesti, dan Wibowo (2020)	Dependen (Y) : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang yang melaksanakan tugas bagian akuntansi atau keuangan dengan minimal masa kerja, yakni satu tahun kerja.	1. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
		Independen (X) : X1 = Sistem Pengendalian Intern X2 = Kompetensi Sumber Daya Manusia X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X4 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah		2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
				3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
				4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3	Permatasari dan Rahman (2021)	Dependen (Y) : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pegawai bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang meliputi dinas, badan, dan kantor di Pemerintahan Kabupaten Buleleng.	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
		Independen (X) : X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah		2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
4	Siahaan dan Simanjuntak (2020)	Dependen (Y) : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara.	1. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
		Independen (X) : X1 = Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah X2 = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan X3 = Sistem Pengendalian Internal		2. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
				3. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
5	Aprila dan Ikyarti (2019)	Dependen (Y) : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pegawai bagian pengelola keuangan Organisasi Perangkat Daerah (SK) Kabupaten Seluma.	1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
		Independen (X) : X1 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan X2 = Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah X3 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		2. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
				3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6	Philadhelphia, Suryaningsum, dan Sriyono (2020)	Dependen (Y) : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Seluruh pegawai/staf sub bagian keuangan OPD Kabupaten Klaten	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia bernilai positif namun tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
		Independen (X) : X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia		2. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan

		X2 = Standar Akuntansi Pemerintah X3 = <i>Good Governance</i> X4 = Sistem Pengendalian Internal		Keuangan Pemerintah Daerah.
				3. <i>Good Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
				4. Sistem Pengendalian Internal bernilai negatif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
7	Shohabatussa'adah dan Nasrullah (2021)	Dependen (Y) : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pegawai sub bagian akuntansi atau keuangan OPD Kota Pekalongan	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia bernilai positif namun tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
		Independen (X) : X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 = Sistem Pengendalian Internal		2. Pemanfaatan Teknologi Informasi bernilai positif namun tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
				3. Sistem Pengendalian Internal bernilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sumber : Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu yang dilakukan terhadap pegawai – pegawai yang bertugas di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Indonesia menunjukkan hasil yang relatif sama. Beberapa variabel independen yang dipilih oleh peneliti seperti Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal yang disebutkan dalam beberapa penelitian terdahulu di atas, menunjukkan hasil yang sama yaitu, berpengaruh positif signifikan.

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang dipilih oleh peneliti masih berpotensi menjadi salah satu permasalahan yang terjadi pada variabel dependen yang dipilih, dan dalam hal ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Adapun beberapa variabel independen lainnya yang disebutkan pada

penelitian terdahulu di atas yang juga diteliti, memiliki hasil yang sama juga, yakni berpengaruh positif dan signifikan. Beberapa variabel tersebut antara lain : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah.

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Standar akuntansi pemerintahan adalah standar yang memastikan bahwa laporan keuangan disusun memenuhi standar informasi keuangan yang berguna bagi penggunaannya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi persyaratan informasi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti memilih penelitian yang dilakukan oleh Aprila dan Ikyarti (2019) yang menyebutkan bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka mengurangi kesalahan maupun kecurangan yang ada, dengan tujuan untuk membuat laporan keuangan yang ada menjadi lebih berkualitas.

Menurut teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti kemudian memberikan kesimpulan bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan adanya teori yang menyatakan bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan, yang tujuannya adalah untuk memberikan laporan keuangan yang berisi informasi berkualitas dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut :

HA1 : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.9.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Definisi Sistem Pengendalian Internal, menurut Mulyadi (2013)

“adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Adanya penerapan sistem pengendalian internal dapat membantu dalam membuat sebuah laporan yang berkualitas dengan menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak sengaja. Sistem pengendalian internal yang dibutuhkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sebuah laporan keuangan yang dihasilkan sehingga dapat relevan dan dapat dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan entitas dalam menjalankan aktivitasnya.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu peneliti memilih penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Simanjuntak (2020) yang menyebutkan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Artinya, kegiatan seperti pengendalian intern di kabupaten/kota dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah yang dikenal dengan inspektorat kabupaten/kota, yang mengawasi semua kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi daerah kabupaten/kota. Apabila aparat pengawasan intern yang melakukan *review* menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari standar akuntansi pemerintahan dan peraturan lainnya, maka aparat pengawasan internal memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang *direview*.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal merupakan proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dengan kegiatan yang dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, penelitian ini memiliki rumusan hipotesis sebagai berikut :

H_{A2} : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.9.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Wirawan (2009) Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif.

Dalam konteks sumber daya manusia hendaknya difokuskan pada pengembangan ketrampilan dan keahlian, wawasan dan pengetahuan, bakat dan potensi, kepribadian dan motif bekerja, serta moral dan etos kerjanya. Berdasarkan uraian di atas, variabel kompetensi SDM dalam penelitian ini diukur dengan 3 indikator, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) (Soeprapto, 2010).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu peneliti memilih penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Rahman (2021) yang menyatakan Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Apabila keterampilan sumber daya manusia diterapkan dengan baik, maka kualitas pelaporan keuangan daerah akan meningkat sehingga pelaporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Berdasarkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berdasarkan teori bahwa dalam penyusunan laporan keuangan serta pengelolaannya dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu memenuhi kriteria yang sejalan dengan tujuan pemerintahan daerah dalam menghasilkan sebuah laporan

keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A3} : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

